



**MEKANISME PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

SRI DALILA ASTUTI

11627204313

PROGRAM S 1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1441 H/2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "**MEKANISME PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**", yang ditulis oleh:

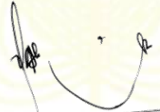
Nama : SRI DALILA ASTUTI

NIM : 11627204313

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juli 2020
Pembimbing Skripsi


Ilham Akbar Shi, SH., MH
NIK.130 217 040

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **“MEKANISME PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : SRI DALILA ASTUTI
NIM : 11627204313
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Secara Online (Daring)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, S.H, M.H

Sekretaris
Hen rizal Hadi, Lc., M.A

Penguji I
Bambang Hermanto M.Ag

Penguji II
Dr. Abu Samah, MH.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sri Dalila Astuti, (2020): Penelitian Ini Berjudul “Mekanisme Pemberhentian Secara Tidak Hormat Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar

Badan Kepegawaian Daerah merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan yang dilimpahkan oleh pemerintahan kepada walikota selaku wakil pemerintahan dalam rangka dekonsentrasi. Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penerapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, pengajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan ketentuan pemberhentian akan terjadi apabila pegawai negeri sipil melanggar aturan aturan sebagaimana yang terjadi di badan kepegawaian daerah kabupaten Kampar adalah bagaimana mekanisme pemberhentian Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah dan Apa faktor penyebab terjadinya pemberhentian Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Kampar.

Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis dimana penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah.

Mekanisme pemberhentian aparatur sipil negara pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen kepegawaian pada badan kepegawaian daerah kabupaten Kampar tidak sesuai dengan prosedur sedangkan faktor penyebab terjadinya pemberhentian aparatur sipil Negara pada penelitian ini disebabkan adanya kejahatan jabatan yang dilakukan aparatur sipil Negara.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Mekanisme Pemberhentian Secara Tidak Hormat Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar**. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan, serta bimbingan baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Hingga terselesainya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

Kepada Ayah Kamaruzzaman S.H dan Ibu Arasniati serta keluarga yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah memotivasi dan membantu Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak dan ibu atas doa, restu dan ridho nya.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag., Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH., M.H dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag., SH., M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Ilham Akbar, Shi, SH., M.H sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Mhd Kastulani, SH., M.H selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.

Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada penulis.

Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum A terkhususnya Mitha Mandasari, Hijrah Novriti, Lady Florensia, Ressi Risanti dan HTN A, serta kawan-kawan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seangkatan 2016 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2020

Penulis,

Sri Dalila Astuti

NIM.11627204313

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum dan lokasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengadilan Negeri	13
B. Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Tugasnya.....	14
C. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah	33
BAB III TINJAUAN PUSTAKA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	
A. Lembaga Lembaga Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil	34
B. Dasar hukum yang melandasi permasalahan yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara	37
C. Penyebab Pemberhentian Aparatur Sipil Negara	38
D. Kewenangan Aparatur Sipil Negara	55
E. Sanksi Hukum terhadap Pelanggar Aparatur Sipil Negara	55
F. Konsekuensi Pemberhentian Tidak Hormat	58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Mekanisme Pemberhentian Tidak Hormat Aparatur Sipil Negara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017	59
--	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemberhentian Tidak Hormat Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Kampar	61
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dan Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Kampar	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	69

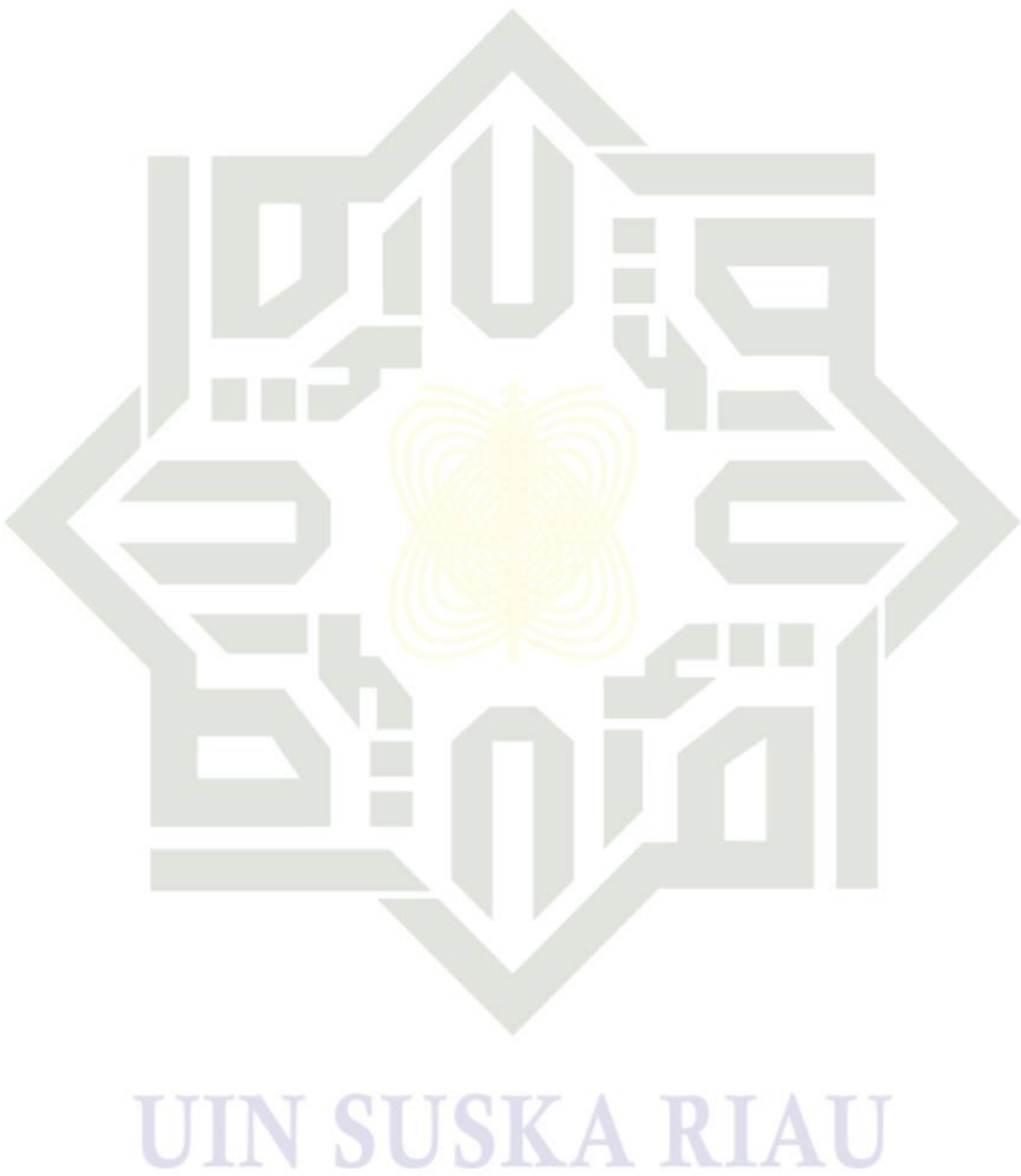
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel	9
-------------------------------------	---

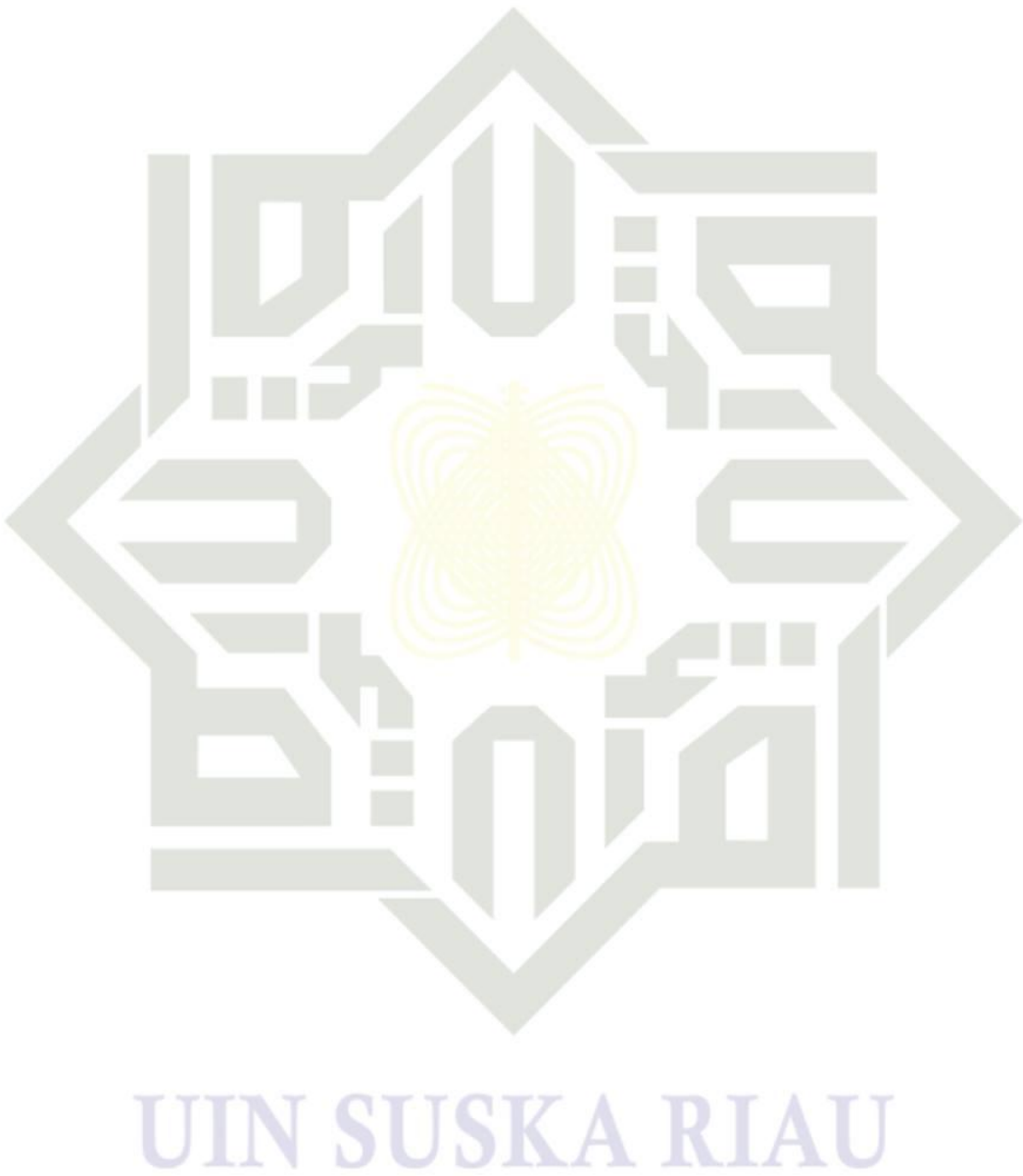


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah	33
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Badan Kepegawaian Daerah merupakan instansi pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan yang dilimpahkan oleh pemerintahan kepada walikota selaku wakil pemerintahan dalam rangka dekonsentrasi.

Badan ini dibentuk setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999. Badan ini mengurus administrasi kepegawaian pemerintahan daerah, baik di pemerintahan daerah, Kabupaten/Kota maupun pemerintahan Provinsi. Hampir sebagian besar BKD (Badan Kepegawaian Daerah) ini hanya berada di tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan di tingkat Provinsi banyak yang masih menggunakan biro, yakni Biro Kepegawaian. Tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan administrasi kepegawaian pada prinsipnya terdiri dari tiga macam, yaitu¹:

1. Penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian
2. Penyiapan dan pelaksanaan pangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan janji, tunjangan, kesejahteraan, dan pemberhentian PNS Daerah, baik yang menduduki jabatan yang struktural/fungsional atau tidak

¹Sri Hartati, Setia jeng Kadarsih & Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h.86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah, dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Daerah.

Manajemen kepegawaian menurut Dr. Siagian, M. P. A. adalah kemampuan atau keterampilan memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. DRS. F.X Soedjadi, M. P. A. mengartikan sebagai proses kegiatan dari pimpinan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui kerja sama yang efisien dari orang lain serta sesuai dengan sumber atau faktor lain yang tersedia untuk itu.²

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 17,18 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam aturan tersebut manajemen pegawai negeri sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki dasar nilai, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Manajemen pegawai negeri sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penerapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,

² Buchori Zainun, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah* (Jakarta: CV Pustaka Masagung, 1990) h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

Penyelenggaraan manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil) dilaksanakan oleh presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN yang dapat mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada PPK. Dalam menyelenggarakan manajemen PNS, Presiden atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.³

Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.⁴

Dalam rangka penyampaian tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

³ <https://www.joglobang.com/gaya/pp-11-2017-manajemen-pns>, diakses senin tanggal 4 November 2019

⁴ Shilvi Dwi Aulia, 2018, *Kasus Korupsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru Provinsi Riau*, (fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Riau) h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 telah memberikan dasar pengertian tentang masalah pemberhentian pegawai negeri sipil, hal tersebut diatur dalam pasal 23 mengenai pegawai negeri sipil diberhentikan secara tidak hormat⁵. Pemberhentian tersebut di karena melakukan pelanggaran/ tindak pidana penyelewengan karena melanggar sumpah atau janji/ melakukan pelanggaran peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat, di hukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (karena suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi tingginya empat tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat).⁶

Berdasarkan hal di atas terjadi adanya pemberhentian 19 orang aparatur sipil negara di pemerintahan kabupaten Kampar secara tidak hormat karena mereka terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Pemecatan dilakukan pasca keluarnya surat keputusan bersama mendagri, menteri PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), dan kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) 182/6597/SJ, nomor 15/2018 lalu. Awal pemecatan dilakukan hanya 18 orang, namun menjelang tahun baru 2019 jumlah itu bertambah menjadi 19 orang setelah pemerintahan Kabupaten Kampar mengeluarkan surat pemberhentian satu orang lagi ASN (Aparatur Sipil Negara) pada tanggal 31 Desember 2018⁷.

⁵ Sudibyo Triatmodjo, *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) h. 172

⁶ Sotomo, *Hukum Kepegawaian dalam Praktek*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1987) h. 224

⁷ <https://pekanbaru.bpk.go.id/?p=36222>, diakses senin tanggal 4 Nopember 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian diatas penulis pada penelitian ini tertarik meninjau terhadap pemberhentian ASN (Aparatur Sipil Negara) di pemerintahan Kabupaten Kampar dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul mekanisme pemberhentian secara tidak hormat terhadap pegawai aparatur sipil negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pada badan kepegawaian daerah Kabupaten Kampar.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas serta lebih mudah untuk dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini membahas mekanisme pemberhentian ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diberhentikan secara tidak hormat yang melibatkan 19 orang di Kabupaten Kampar pada tahun 2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemecatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kampar?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pemecatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Negara pada dinas Badan Kepegawaian Daerah Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui bagaimana mekanisme pemberhentian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kampar?
- b. Mengetahui Apa faktor penyebab terjadinya pemberhentian Aparatur Sipil Negara berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Negara pada Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kampar?

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai mekanisme pemberhentian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kampar

- b. Secara Praktis

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Secara Akademis

Secara akademis penelitian ini dapat berguna bagi program studi hukum dapat memberikan kajian dan analisis mendalam pemberhentian aparatur sipil Negara berdasarkan pemerintahan nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pada badan kepegawaian daerah Kampar.

Dan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan untuk kajian dan bahan informasi bagi peneliti berikutnya untuk permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁸. Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum berlaku di masyarakat. Penelitian ini bertitik tolak dari data primer yakni data yang diperoleh langsung baik melalui observasi (pengamatan), penyebaran angket maupun wawancara.

⁸Sugiono, *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2012),h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar. Alasannya karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah kepala Badan Kepegawaian Daerah, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pemberhentian secara tidak hormat kepada ASN yang berada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.⁹ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati) kejadian, kasus kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama. Adapun populasi dari penelitian ini adalah kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar, Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian Daerah, Pegawai yang dipecat.

⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h.98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi, Sekretaris Pengadilan Negeri.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1.	Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi	1 orang	1 orang	100%	Wawancara
2.	Sekretaris Pengadilan Negeri	1 orang	1 orang	100%	Wawancara

5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder dan data tersier.

a. Data Primer

Data primer adalah data dasar atau data empiris yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah.

c. Data Tersier

Data yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel artikel, majalah hukum, jurnal dan sebagainya.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

a. Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.

b. Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung berdasarkan arah dan tujuan dalam penulisan skripsi ini kepada narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Studi kepustakaan

Peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan dengan seluruh responden yang dideskriptifkan secara menyeluruh, kemudian sumber data tersebut digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap tiap bab terbagi lagi dalam sub sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri secara sistematis. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Rangkaian tersebut antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum tentang sejarah singkat Badan Kepegawaian Daerah Kampar. Letak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

geografis kedudukan pemerintahan kabupaten Kampar, stuktur kelembagaan kepegawaian daerah Kampar.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat konsep konsep dasar hukum yang melandasi permasalahan yang berkaitan dengan lembaga lembaga pengelolaan pegawai negeri sipil, dasar hukum yang melandasi permasalahan yang berkaitan dengan aparatur sipil negara, penyebab pemberhentian aparatur sipil negara, kewenangan aparatur sipil negara, sanksi hukum terhadap pelanggar aparatur sipil negara, konsekuensi pemberhentian tidak hormat mekanisme pemberhentian tidak hormat, aparatur sipil negara menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat Faktor Bagaimana mekanisme pemecatan Aparatur Sipil Negara peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kampar dan apa faktor penyebab terjadinya pemecatan Aparatur Sipil Negara dan bagaimana pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Negara pada Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kampar

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Bangkinang

Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, maka pemerintahan kabupaten/ kota telah memberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur pemerintahannya sendiri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kabupaten Kampar pernah menjadi daerah kabupaten percontohan di Provinsi Riau sebagai Implementasi dari Undang-Undang yang lama (Undang-Undang No 5 Tahun 1974)¹⁰

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan peraturan pemerintahan Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau.¹¹

Badan Kepegawaian Daerah berada dibawah daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu pejabat Pembina kepegawaian daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Sipil Daerah.

Ada empat golongan kepangkatan pegawai mulai dari pangkat rendah sampai pangkat yang tinggi golongan I-III dibagi atas ruang a,b,c,d sedangkan golongan IV dibagi atas golongan a,b,c,d dan e

¹⁰ Muhammad Rifki, *Analisis Perkembangan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar*, (Universitas Islam Riau: Fakultas Ekonomi dan ilmu Hukum 2012) h. 52

¹¹ Ikhwan Ridwan, *Rencana Kinerja Tahunan 2018 Badan Kepegawaian Riau*, (Riau:2018) h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan untuk pegawai dikenal dengan nama ekselon, terdiri dari 4 ekselon yaitu:¹²

1. Ekselon I merupakan ekselon tertinggi dijabat oleh pejabat struktural tertinggi didalam kepegawaian sipil, seperti jabatan sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektorat jenderal suatu departemen pemerintahan.
2. Ekselon II merupakan jabatan dibawah ekselon I, seperti kepala biro, direktur dan kepala pusat.
3. Ekselon III merupakan jabatan struktural dibawah ekselon II, seperti kepala bagian, kepala bidang, kepala subdirektorat.
4. Ekselon IV merupakan jabatan struktural yang terendah dibawah ekselon III, seperti kepala sub bagian, kepala sub- bidang dan kepala seksi.

B. Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Tugasnya

Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pengelolaan badan kepegawaian daerah peraturan gubernur Riau berfungsi sebagai berikut :¹³

Badan Kepegawaian Daerah di pimpin oleh badan kepegawaian daerah dan dibantu perangkat perangkat lainnya :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, program dan perumusan kebijakan, pengelolaan keuangan, pembinaan administrasi dan aparatur Badan Kepegawaian Daerah;

¹² Miftah Thoha, *Manajemen kepegawaian sipil di Indonesia*,(Jakarta: kencana 2007)

¹³ Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, KepalaBadan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program Badan Kepegawaian Daerah
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program Badan Kepegawaian Daerah
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas program dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas program dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan administrasi aparatur pemerintah di Badan Kepegawaian Daerah
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol;
- b. Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala badan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,

Sekretaris, mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan program Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Melaksanakan tugas dan program Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan tugas program dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas program dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Melaksanakan pembinaan dan administrasi aparatur pemerintah Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaandi lingkup Badan Kepegawaian Daerah dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah;

1) Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Bina Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Kepala Sub Bagian Bina Program, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- b. Melaksanakan pengolahan data;
- c. Melaksanakan perencanaan program;
- d. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dinas;
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghargaan, kenaikan pangkat, DP3, DUK, Sumpah/Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan pegawai, usul mutasi dan pemberhentian pegawai, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;

- e. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, , menyusun standar kompetensi pegawai, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventarisasi;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pengembangan Pegawai

- a. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyusunan formasi, pengadaan serta pengembangan kompetensi pegawai;
- b. Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bidang Pengembangan Pegawai, mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan administrasi penyusunan formasi, pengadaan, pendidikan dan atau pelatihan sesuai program yang ditetapkan ;
- b) Melaksanakan penyusunan pemetaan potensi pegawai ;
- c) Melaksanakan penyusunan formasi, pengadaan, pendidikan dan atau pelatihan serta pengembangan kompetensi pegawai ;
- d) Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan pengisian formasi dan pengadaan serta pengembangan karier pegawai ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa kebutuhan pendidikan dan atau pelatihan dengan instansi terkait ;
- f) Melaksanakan upaya pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai ;
- g) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
 - 1) Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengadaan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Karier.
 - 2) Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - 3) Kepala Sub Bidang Pengadaan, mempunyai tugas :
 - a. Fasilitasi menyusun rencana, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Memproses penertiban surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Fasilitasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan seleksi calon praja IPDN;
 - d. Menyusun rencana dan memproses rekomendasi mengikuti seleksi tugas tugas dan memproses penertiban surat keputusan tugas belajar;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menyusun rencana melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan seleksi calon peserta diklat kepemimpinan Tk II, III dan IV;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 4) Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional;
 - b. Menyusun rencana dan memproses administrasi pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat I dan II;
 - c. Menyusun rencana dan memproses administrasi pemanggilan peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III, IV dan Prajabatan;
 - d. Menyusun rencana dan memproses administrasi pengiriman peserta Diklat Luar Negeri;
 - e. Mengelola izin ke Luar Negeri selain dari Tugas Belajar yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi SDM Aparatur;
 - f. Memproses penerbitan Surat Izin Belajar;
 - g. Mengelola administrasi pelaksanaan kegiatan Tugas Belajar;
 - h. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Diklat Luar Negeri dan Tugas Belajar;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bidang Mutasi

- a. Bidang Mutasi, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang administrasi pengangkatan Calon PNSD, PNSD, kepangkatan, perpindahan PNSD, pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan;

- b. Kepala Bidang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mutasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan administrasi kepangkatan, perpindahan, pengangkatan dan pemberhentian jabatan sesuai program yang ditetapkan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pengangkatan Calon PNSD dan PNSD;
- c. Pelaksanaan pengelolaan kenaikan pangkat, gaji berkala dan perpindahan pegawai;
- d. Pelaksanaan pengumpulan data pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, non struktural serta jabatan fungsional;
- e. Pelaksanaan administrasi pemberhentian pegawai;
- f. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1) Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Non Jabatan;
- b. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- 3) Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Non Jabatan, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional;
 - b. Menyiapkan bahan administrasi penilaian dan evaluasi pelaksanaan jabatan sesuai standar kompetensi;
 - c. Menyiapkan bahan penelitian dan penetapan angka kredit di SKPD Pemerintah Provinsi Riau;
 - d. Menyiapkan bahan pertimbangan penetapan pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan;
 - e. Menyiapkan bahan pemrosesan penerbitan surat keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan;
 - f. Menyiapkan bahan persiapan pelantikan dan serah terima jabatan;
 - g. Menyiapkan bahan pemrosesan dan menetapkan perpindahan pegawai antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - h. Menyiapkan bahan pemrosesan usulan perpindahan pegawai antar Kabupaten/Kota antar Provinsi dan perpindahan dari Pemerintah ke Kabupaten/Kota;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Menyiapkan bahan pemrosesan usulan perpindahan pegawai dari Pemerintah Provinsi Riau ke Provinsi lain atau ke Pusat dan dari Pusat atau provinsi lain ke Pemerintah Provinsi Riau;
 - j. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 4) Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan pengadministrasian penetapan kepangkatan, perpindahan dan pemberhentian / pensiun pegawai;
 - b. Menyiapkan bahan pemrosesan Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Menyiapkan bahan pengadministrasian Keputusan Kenaikan Pangkat, Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala dan Penambahan Masa Kerja;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan usulan dan menetapkan pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Melaksanakan pemberkasan dan Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Melakukan tugas-tugas sosialisasi peraturan terkait dengan tugas-tugas sub bidang;
 - g. Memproses Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kewenangan Gubernur Riau;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Monitoring, Pendataan dan Evaluasi tentang Kepangkatan dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau.

5. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai

- a. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;
- b. Kepala Bidang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 15, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan tugas dan program kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;
- b. Melaksanakan tugas dan program kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;
- c. Pemantauan dan evaluasi kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;
- d. Melaksanakan analisa dan pelaporan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;
- e. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
 - 1) Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Kedudukan Hukum;
 - b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- 2) Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum, mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan perencanaan di bidang kedudukan hukum;
 - b) Melaksanakan program kegiatan di bidang kedudukan hukum;
 - c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang kedudukan hukum;
 - d) Melaksanakan kegiatan pemrosesan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - e) Melaksanakan kegiatan proses Izin PNS yang Ikut PILKADA;
 - f) Melaksanakan kegiatan Pemantauan PNS dan memproses Hasil Pemantauan Disiplin PNS;
 - g) Melaksanakan kegiatan proses Pemberhentian PNS Atas Permintaan Sendiri maupun Tidak Atas Permintaan Sendiri;
 - h) Melaksanakan kegiatan proses Izin Perkawinan PNS;
 - i) Melaksanakan kegiatan proses Izin Perceraian PNS;
 - j) Melaksanakan kegiatan proses Sumpah/Janji PNS;
 - k) Melaksanakan kegiatan penyusunan draft Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS;
 - l) Melaksanakan kegiatan penyusunan Draft Instruksi Gubernur tentang Disiplin PNS;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m) Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Arsip Dokumentasi Peraturan-peraturan Kepegawaian (UU, PP, SE);
- n) Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip Keputusan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- o) Melaksanakan kegiatan rekapitulasi Daftar Hadir PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- p) Menyiapkan Rekomendasi Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS;
- q) Menyiapkan Surat Edaran Gubernur tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama;
- r) Melaksanakan Kegiatan Rekapitulasi Daftar Hadir PNS pada Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama;
- s) Melaksanakan kegiatan pemrosesan Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karyasatya (SLKS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota;
- t) Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tata laksana dalam melakukan penyuluhan Hukum kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan di Kabupaten/Kota;
- u) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kedudukan hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota;
- v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai, mempunyai tugas :
 - a) Memproses Pengurusan Tabungan Perumahan (TAPERUM) PNS dan Pensiun Pemerintah Provinsi Riau;
 - b) Mengelola Pengurusan Kartu ASKES dan TASPEN Pegawai Pemerintah Provinsi Riau;
 - c) Melaksanakan pelatihan PNS Pemerintah Provinsi Riau yang memasuki masa pensiun/purna bhakti;
 - d) Pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi Kerja Baik;
 - e) Pemberian penghargaan kepada PNS Pemerintah Provinsi Riau Purna Bhakti;
 - f) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesegaran jasmani (pembinaan olahraga PNS);
 - g) Melaksanakan kegiatan bidang kesejahteraan PNS Pemerintah Provinsi Riau;
 - h) Menyiapkan bahan pemrosesan penyelenggaraan fasilitas pemeriksaan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi Riau;
 - i) Menyiapkan bahan persiapan pemberian bantuan tunjangan kesejahteraan PNS Pemerintah Provinsi Riau;
 - j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai.

6. Bidang Administrasi Kepegawaian

- a. Bidang Administrasi Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan, mengendalikan, merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

danpetunjuk penyusunan dokumentasi, pengolahan dan pelaporanadministrasi pegawai, serta memfasilitasi pembinaan administrasikepegawaian;

- b. Kepala Bidang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada KepalaBadan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, BidangAdministrasi Kepegawaian, mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan pengolahan data, dokumentasi dan evaluasi administrasi kepegawaian;
- a. Melaksanakan koordinasi pengembangan dan pembangunan sistem infomasi manajemen kepegawaian;
- b. Mengelola pelaksanaan ujian dinas dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Melaksanakan pendataan administrasi kepegawaian, penyusunan DUK, mengelola penerbitan Kartu Pegawai dan Penerbitan Kartu Suami/Istri;
- d. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pengolahan administrasi dan dokumentasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan penyusunan peraturan yang berkaitan dengan dokumentasi dan pengolahan data kepegawaian.

1) Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri dari :

- a) Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Sub Bidang Administrasi Kepegawaian.

2) Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

3) Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), mempunyai tugas :

a) Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan pembangunan sistem informasi manajemen kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

b) Menyiapkan bahan pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi manajemen kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

c) Melakukan perekaman dan pengolahan data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

d) Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan data pegawai secara manual dan elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

e) Mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawian dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

f) Mengelola dan mengembangkan Tata Naskah Dinas Kepegawaian Elektronik maupun Tata Naskah Dinas Manual;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Menyiapkan bahan kebijakan yang berkaitan d tata naskah dinaskepegawaian Elektronik (E-Documen) dan Tata Naskah Dinas Manual;
 - h) Menyiapkan bahan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan data kepegawaian Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 - i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 4) Kepala Sub Bidang Administrasi Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a) Menghimpun, mengelola dan pemeliharaan data kepegawaian;
 - b) Mengelola Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil Propinsi dan Kabupaten/Kota se Propinsi Riau;
 - c) Mengelola Cuti Tahunan Pejabat Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor serta Direktur Rumah Sakit;
 - d) Mengelola Cuti Besar Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Ibadah Agama;
 - e) Mengelola Pelaksanaan Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f) Mengelola Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Badan,

Kantor dan Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Propinsi Riau;

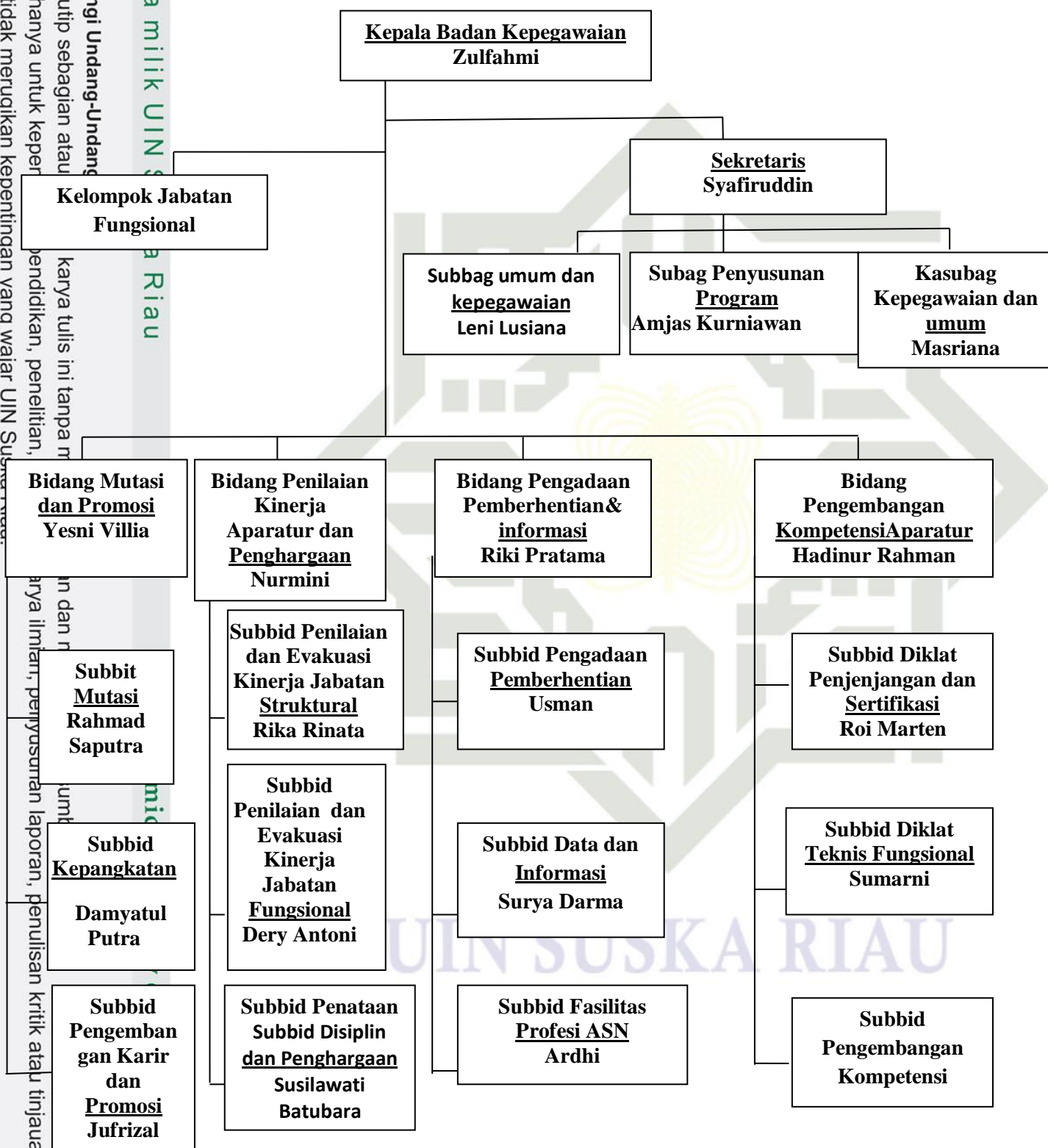
- g) Mengelola Penerbitan Kartu Pegawai;
- h) Mengelola Penerbitan Kartu Suami/Istri;
- i) Memfasilitasi pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Gambar 2.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga Lembaga Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil

Dalam pengelolaan pegawai negeri sipil ada beberapa lembaga yaitu:¹⁴

1. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan)

Lembaga ini diatur dalam keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja menteri Negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut pemerintahan ini dibebani fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur Negara
- b. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang pendayagunaan aparatur Negara
- c. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada presiden.

2. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Perubahan BAKN menjadi BKN pada 1999 antara lain disebabkan bertambahnya jumlah Pegawai Negeri Sipil di Indonesia mencapai empat juta orang tetapi jumlah tersebut belum diimbangi dengan kemampuan Pegawai negeri sipil yang memadai. Keberadaan Badan Kepegawaian Negara semakin kuat sejak Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999

¹⁴ Ibid., h.13-18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pokok pokok kepegawaian yang ditetapkan menggantikan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang mengatur hal yang sama. Dalam menjalankan tugas Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan Fungsi:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang kepegawaian
- b. Penyelenggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pendidikan, dan pelatihan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil.
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat Negara dan mantan pejabat Negara
- d. Penyelenggaraan administrasi dan system informasi kepegawaian Negara dan mutasi kepegawaian antarprovinsi
- e. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar, dan prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Daerah dan bidang kepegawaian lainnya.
- f. Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian kepada instansi pemerintahan.
- g. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan Badan Kepegawaian Negara.
- h. Fasilitasi kegiatan instansi pemerintah dibidang administrasi kepegawaian
- i. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Lembaga Administrasi Negara

Didalam keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja organisasi dan tatakerja lembaga pemerintah nondepartemen disebut bahwa Lembaga Administrasi Negara bertanggung jawab melaksanakan tugas administrasi Negara tertentu. Tugas tersebut dimanifestasikan ke dalam jumlah fungsi yaitu:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi Negara
- b. Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi Negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur
- c. Pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi Negara
- d. Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomatisasi administrasi Negara
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Negara
- f. Koordinasi kegiatan fungsional dalam kegiatan tugas
- g. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintahan di bidang administrasi Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketata usahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuanganm kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

3. Badan Kepegawaian Daerah

Badan ini dibentuk setelah otonomi daerah tahun 1999. Badan ini mengurus pemerintahan daerah baik pemerintahan kabupaten atau kota maupun pemerintahan daerah provinsi.

B. Dasar Hukum Yang Melandasi Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Aparatur Sipil Negara

Kedudukan dan peranan dari Aparatur Sipil Negara dalam pemerintahan sangatlah penting, sebab Aparatur Sipil Negara merupakan tulang punggung dari pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.¹⁵

Peraturan pemberhentian pegawai negeri sipil adalah peraturan pemerintahan nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1994 dan peraturan menteri nomor 65 tahun 2008.

Pemberhentian pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pasal 1 huruf a peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil (peraturan pemerintah pemberhentian pegawai negeri

¹⁵ Fitri Rahmadhani, *Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Sipil Di Indonesia*, Universitas katolik parahyangan, h.193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sipil), adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.¹⁶

Peraturan terkait pemberhentian pegawai negeri sipil lainnya yang perlu dilihat antara lain:

1. Undang undang nomor 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai
2. Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1966 tentang pemberhentian/pemberhentian sementara pegawai negeri sipil
3. Peraturan menteri nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1994 dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2008
4. Surat edaran kepala badan administrasi kepegawaian Negara nomor 04/SE1980 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil
5. Surat edaran kepala badan kepegawaian Negara nomor 04/SE/1987 tanggal 8 januari 1987 tentang batas usia pension pegawai negeri sipil
6. Pemberhentian nomor 37 tahun 2004 tentang larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota politik.

Penyebab Diberhentikannya Aparatur Sipil Negara

Ada beberapa penyebab diberhentikannya aparatur sipil negara menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil:¹⁷

¹⁶ <https://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/87541-dasar-hukum-pemberhentian-pns/>
diakses tanggal 28 juli 2020 pukul 20:15

¹⁷ Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 32 Tahun 1979

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemberhentian atas permintaan sendiri

- a. Pegawai negeri sipil yang meminta pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pemberhentian akan ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan yang mendesak
- c. Permintaan pemberhentian dapat ditolak apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih terkait dalam keharusan bekerja pada pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun

- a. Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan secara hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- b. Batas usia pension 56 tahun
- c. Batas usia pension dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu

3. Diberhentikan karena adanya penyederhanaan organisasi

Apabila adanya penyederhanaan suatu satuan organisasi Negara yang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu disalurkan kepada organisasi lainnya maka diberhentikan secara hormat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemberhentian karena adanya pelanggaran / tindak / pidana / penyelewengan

- a. Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, sumpah/janji jabatan Negeri atau peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil
- b. Dihukum penjara atau kurungan paling lama 4 tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat
- c. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

5. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani

- a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya
- b. Menderita penyakit atau kelaian yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya
- c. Setelah berakhirnya cuti sakit dan belum mampu bekerja kembali

6. Pemberhentian karena meninggalkan tugas

- a. Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya selama dua bulan terus-menerus, diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga
- b. Dalam kurun waktu enam bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya
- c. Ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya itu karena ada alasan yang dapat diterima
- d. Diberhentikan dengan hormat apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan mengganggu suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang

- a. Pegawai Negeri Sipil yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke-12 (dua belas) sejak ia dikatakan hilang
- b. Pernyataan hilang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib
- c. Apabila dikemukakan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil

8. Pemberhentian karena hal-hal yang lain

- a. Pegawai negeri sipil yang tidak melaporkan kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, diberhentikan secara hormat sebagai pegawai negeri sipil
- b. Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, tetapi tidak dapat dipekerjakan kembali karena tidak adanya lowongan diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada tiga jenis pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara :¹⁸

1. Diberhentikan dengan hormat diatur dalam pasal 87 ayat 1 Undang Undang Aparatur Sipil Negara

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri

¹⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mencapai batas usia
- d. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pension dini
- e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban

2. Diberhentikan dengan tidak hormat diatur dalam pasal 87 ayat (4)

Undang Undang Aparatur Sipil Negara

- a. Melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

3. Diberhentikan sementara

- a. Diangkat menjadi pejabat Negara
- b. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstructural
- c. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengaktifkan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan oleh pejabat Pembina kepegawaian

Ada beberapa penyebab diberhentikannya Aparatur Sipil Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 :

1. Pemberhentian dari jabatan administrasi
 - a. Mengundurkan diri dari jabatan
 - b. Diberhentikan sementara sebagai PNS
 - c. Menjalani cuti diluar tanggung jawab Negara
 - d. Menjalani tugas belajar lebih dari enam bulan
 - e. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan administrasi
 - f. Tidak memenuhi persyaratan jabatan
2. Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu huruf a dapat ditunda untuk paling lama (1) satu tahun
3. Pejabat administrasi dapat juga diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan kualitatif dan tingkat pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 ayat (6)
4. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan administrasi karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jabatan administrasi yang terakhir apabila tersedia lowongan jabatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberhentian terjadi apabila :¹⁹

1. Pemberhentian atas diri sendiri

- a. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- b. Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) ahun, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas
- c. Permintaan berhenti sebagaimana pada ayat (1) ditolak apabila :
 - 1) Sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan
 - 2) Terikat kewajiban bekerja pada instansi pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 3) Dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - 4) Sedang mengajukan upaya banding administrative karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
 - 5) Sedang menjalani hukuman disiplin
 - 6) Alasan lain menurut pertimbangan PPK

2. Pemberhentian karena mencapai batas pensiun

- a. Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Batas usia pensiun :

- 1) 58 tahun bagi pejabat administrasi, jabatan fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan
- 2) 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya
- 3) 65 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengaku pejabat fungsional ahli utama

3. Pemberhentian karena perampungan organisasi atau kebijakan pemerintahan

- a. Perampungan organisasi atau kebijakan pemerintahan yang mengakibatkan kelebihan Pegawai Negeri Sipil maka Pegawai Negeri Sipil tersebut terlebih dahulu disalurkan pada instansi pemerintahan lain.
- b. Pada saat terjadinya perampungan organisasi sudah mencapai usia 50 tahun dan masa kerja 10 tahun
- c. Apabila Pegawai Negeri Sipil tidak dapat disalurkan pada instansi lain , belum mencapai usia 50 tahun, masa kerja kurang dari 10 tahun di berikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun
- d. Apabila sampai 5 (lima) tahun tidak dapat disalurkan maka diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai hak kepegawaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Saat berakhirnya uang tunggu belum berusia 50 tahun jaminan pensiun mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 tahun
- f. Ketentuan mengenai kriteria dan penetapan kelebihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani

- a. Pengadilan Negeri Sipil yang tidak cakap diberhentikan dengan hormat apabila :
 - 1) Tidak dapat bekerja lagi karena kesehatannya
 - 2) Menderita penyakit yang berbahaya bagi dirinya dan lingkungan kerjanya
 - 3) Tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit
- b. Tidak cakupnya jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan
- c. Tim kesehatan dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan
- d. Tim penguji kesehatan beranggotakan dokter pemerintahan
- e. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

5. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang

- a. Pegawai yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan secara hormat dan mendapatkan hak kepegawaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apabila pegawai telah berkeluarga, kepada janda/duda atau anak diberikan hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang undangan
- c. Apabila pegawai tidak memiliki keluarga, kepada orang tuanya diberikan hak pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- d. Seorang Pegawai dinyatakan hilang apabila tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia
- e. Pernyataan hilang dibuat oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan surat keterangan atau berita acara pemeriksaan dari pihak kepolisian Negara Republik Indonesia
- f. Janda/duda atau anak Pegawai Negeri Sipil diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- g. Pegawai yang hilang ditemukan kembali dan masih hidup dapat diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil sepanjang yang bersangkutan belum mencapai batas pensiun
- h. Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah Pegawai yang bersangkutan di periksa oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Terbukti hilang karena kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, Pegawai yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pegawai yang hilang ditemukan kembali dan telah mencapai batas usia, Pegawai yang bersangkutan akan di berhentikan secara hormat dan diberi hak kepegawaian.
 - j. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPK dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - k. Pegawai yang terbukti hilang karena kemauan dan kemampuan yang bersangkutan pegawai yang bersangkutan wajib mengembalikan hak kepegawaian yang telah diterima oleh janda/dan duda atau anaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 6. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan**
 - a. Pegawai yang diberhentikan secara hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana
 - b. Pegawai yang dipidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih melakukan pidana dengan tidak berencana tidak diberhentikan sebagai Pegawai apabila
 - 1) Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari Pegawai Negeri Sipil
 - 2) Mempunyai prestasi kerja yang baik
 - 3) Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali
 - 4) Tersedia lowongan jabatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pegawai yang dipidana kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagaimana Pegawai Negeri Sipil apabila tersedia lowongan jabatan
- d. Pegawai yang dimaksudkan diatas selama melakukan tindak pidana maka tetap berstatus sebagai Pegawai dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai Pegawai
- e. Diaktifkan kembali sebagai pegawai apabila tersedia lowongan jabatan.
- f. Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- g. PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat.

7. PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
- e. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- f. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

8. Pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin

- a. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
- b. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pemberhentian karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

- a. PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
- b. Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
- c. PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- d. PNS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- e. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

10. Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

- a. PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- b. PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.
- c. PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.
- d. PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.
- e. PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

11. Pemberhentian karena tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara

- a. PNS yang tidak menjabat lagi sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.

- b. Selama menunggu tersedianya lowongan Jabatan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS dan diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diangkat sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai akhir bulan sejak 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.

12. Pemberhentian karena Hal Lain

- a. PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya.
- b. Batas waktu melaporkan diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulansetelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
- c. PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. PNS yang melaporkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi tidak dapat diangkat dalam Jabatan pada instansi induknya, disalurkan pada instansi lain.
- e. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaktifkan kembali sebagai PNS sesuai Jabatan yang tersedia.
- f. Penyaluran pada instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PPK setelah berkoordinasi dengan Kepala BKN.
- g. PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- h. PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- i. PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- j. PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- k. Dalam hal PNS tidak melapor kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Wewenangan Aparatur Sipil Negara

Wewenang Aparatur Sipil Negara Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 32 :

1. Mengawasi setiap tahapan pengisian jabatan pimpinan tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, penyusunan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Mengawasi dan mengevakuasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan ode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara
3. Meminta informasi dari pegawai Aparatur Sipil Negara dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan ode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara
4. Memeriksa dokumen yang terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan ode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara
5. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan ode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.

E. Sanksi Hukum yang diberikan terhadap Pelanggar Aparatur Sipil Negara

Sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 33 :

1. Peringatan
2. Teguran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran
4. Hukuman disiplin untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan Aparatur Sipil Negara, terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembinaan Kepegawaian
6. Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan terhadap pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil, tingkat hukuman terdiri dari tiga yaitu :²⁰

1. Hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat adalah hukuman yang meliputi penghapusan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil (PP 53/2010)
2. Hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat ringan adalah hukuman yang meliputi teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

²⁰ Bambang Wiranto, *Kamus Kepegawaian Republik Indonesia*, (Bogor: Garuda Mas Jajhatera, 2006) h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang Hukuman yang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama untuk satu tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun.²¹

Setiap penjatuhan hukuman disiplin pegawai ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum keputusan tersebut akan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang untuk menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serta tembusnya disampaikan kepada pejabat instansi terkait. Apabila Pegawai Negeri Sipil tidak setuju dengan keputusan pejabat terkait pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dapat dilakukan upaya administrative, yang terdiri dari ²²:

1. Keberatan, diajukan karena hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun atau penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun (pejabat ekselon I dan II) dengan cara keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya sampai kepada pejabat yang berwenang menghukum
2. Banding administrative, diajukan karena disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

²¹ Ibid., h. 44

²² Andi Harun Ansori, *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindakan Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil, Universitas Gunung Rinjani, fakultas hukum*) h. 51-54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegawai Negeri Sipil, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur.

Konsekuensi Terhadap Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Dalam Undang Undang ASN tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar sumpah/janji PNS atau sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji PNS dan sumpah/janji karena tiak setia kepada pancasila, Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara serta Pemerintah. Dalam proses pemberhentiannya Pegawai yang dikenakan tidak berhak mendapatkan pension karena dianggap telah melakukan hal yang fatal. Karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat telah menerima dan menjalani hukuman pidana sesuai dengan putusan pengadilan. Seperti mendapatkan hukuman yang berlipat ganda, setelah keluar penjara kemudian dipecat serta kehilangan kedudukan dan status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dengan dipenjara dan membayar denda yang cukup besar telah menimbulkan efek jera terhadap Pegawai belum lagi sanksi sosial yang sangat berat yang harus dihadapi, selain itu mencari pekerjaan juga akan mengalami kesulitan. Apabila ingin bekerja di sektor pemerintahan menjadi Aparatur Sipil Negara, dipastikan tidak dapat karena salah satu syarat menjadi Pegawai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Sipil tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana kurungan 2 (dua) tahun di penjara atau lebih.²³

Mekanisme Pemberhentian Tidak Hormat Aparatur Sipil Negara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

1. Definisi Pemberhentian Tidak Hormat

Pemberhentian tidak hormat adalah termasuk kategori disiplin berat. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Pemberhentian dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak semata mata pemutusan hubungan kerja, namun karena adanya hal lain yang menyebabkan pegawai yang diberhentikan mendapatkan hak yang berbeda dari karyawan perusahaan.

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat akan mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan hak pensiun. Pemberhentian secara tidak hormat yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan²⁴

²³ Fitri Rahmadhani Muvariz, Op.cit h. 197-200

²⁴ Aswin Eka Adhi, *Pengertian dan Ruang Lingkup Pemberhentian dan Pensiun Pegawai*, Modul 1, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mekanisme Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017

dalam peraturan pemerintahan yang di tandatangai oleh Joko Widodo pada Maret 2017 terdapat mekanisme pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan penanganannya. Diantaranya permintaan atas diri sendiri, karena mencapai batas usia pensiun dank arena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah. Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Permintaan berhenti dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun apabila Pegawai tersebut masih diperlukan dalam kepentingan dinas. Dan ada juga tentang pemberhentian dengan tidak hormat apabila : melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hbungnnya dengan jabatan dan/atau pidana umum, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.²⁵

²⁵Menpan.go.id diakses pada tanggal 29 juli 2020 pukul 23:17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemberhentian kepada Aparatur Sipil Negara dilakukan dengan 2 cara yaitu pemberhentian secara hormat dan pemberhentian secara tidak hormat pemberhentian tersebut telah diatur didalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2017. Pemberhentian secara tidak hormat dikarenakan kejahatan jabatan/tindak pidana/penyelewengan dan pemberhentian karena meninggalkan tugas. Dan pada pemberhentian ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Faktor penyebab terjadinya pemberhentian ini dikarenakan kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Secara aturan sudah jelas dalam undang-undang ataupun dalam peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil bahwa yang melakukan tindak pidana atau kejahatan jabatan maka akan di berhentikan secara tidak hormat.

Saran

1. Secara umum bentuk pemberhentian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Aparatur Sipil Negara dari Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 32 Tahun 1979, UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sudah sangat memadai,

namun pemerintah lebih memperhatikan lagi bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara bisa terjadi dengan begitu mudah.

2. Dalam melakukan prosedur pemeriksaan terhadap suatu pelanggaran peraturan kepegawaian yang mengakibatkan pemberhentian kepada Aparatur Sipil Negara hendaknya diperiksa lebih teliti. Peraturan tegas dan tidak diskriminasi memang diperlukan di semua bidang tidak terkecuali kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran pelanggaran yang mengakibatkan pemberhentian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Wiranto, Kamus Kepegawaian Republik Indonesia, (Bogor: Garuda Mas Sejahtera, 2006)
- Buchori Zainun, Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah, (Jakarta:CV Haji Masagung, 1990)
- Miftah Thoha, Manajemen kepegawaian sipil di Indonesia, (Jakarta: kencana 2007)
- Sotomo, Hukum Kepegawaian dalam Praktek, (Surabaya, Usaha Nasional, 1987)
- Sri Hartati, Setia jeng Kadarsih & Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Sudibyo Triatmodjo, Hukum kepegawaian mengenai kedudukan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1983)
- Sugiono, penelitian kualitatif dan kuantitatif dan kualitatif dan R&D, (Bandung:alfabeta,2012)
- Zainuddin ali, metode penelitian hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Jurnal

- Andi Harun Ansori, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindakan Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil, (Universitas Gunung Rinjani, fakultas hukum) h. 51-54
- Aswin Eka Adhi, Pengertian dan Ruang Lingkup Pemberhentian dan Pensiun Pegawai, Modul 1, h. 13
- Hatri Rahmadhani, Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Sipil Di Indonesia, Universitas katolik parahyangan
- Cita Herni Saputri, Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Lingkup Organisasi Daerah, (Unuversitas Lampung Fakultas Hukum)
- Ridwan Ridwan, Rencana Kinerja Tahunan 2018 Badan Kepegawaian Riau, (Riau,2018)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Rifki, Analisis Perkembangan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar, (Universitas Islam Riau, Fakultas Ekonomi dan ilmu Hukum 2012)

Shilvi Dwi Aulia, 2018, Kasus Korupsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Perempuan di lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II A Pekanbaru Provinsi Riau, (fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Riau)

Wawancara

Ricko Oktavius, (Sekretaris Pengadilan Negeri)

Riki Pratama, (Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi)

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 32 Tahun 1979

SKB 3 Menteri

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Artikel

[https://pekanbaru.bpk.go.id/?p=36222,](https://pekanbaru.bpk.go.id/?p=36222)

[https://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/87541-dasar-hukum pemberhentian-pns/](https://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/87541-dasar-hukum-pemberhentian-pns/)

<https://www.joglobang.com/gaya/pp-11-2017-manajemen-pns>

<https://www.joglobang.com/gaya/pp-11-2017-manajemen-pns>

<https://bkd.riau.go.id/profil/tentang-bkd/>

[Menpan.go.id](https://menpan.go.id)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/33630
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
Un.04/F.I/PP.00.9/2724/2020 Tanggal 1 April 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

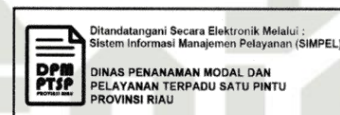
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SRI DALILA ASTUTI |
| 2. NIM / KTP | : 11627204313 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : MEKANISME PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAHAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : BKD DAN PN BANGKINANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Juli 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, “**MEKANISME PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN**” yang ditulis oleh :

Nama : SRI DALILA ASTUTI
NIM : 11627204313
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari/ Tanggal : Rabu, 11 Agustus 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Secara Online (Daring)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, S.H, M.H

Sektretaris
Hen rizal Hadi, Lc., M.A

Penguji 1
Bambang Hermanto, M.Ag

Penguji 2
Dr. Abu Samah, MH

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 197508012007011023

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **“MEKANISME PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : SRI DALILA ASTUTI
 NIM : 11627204313
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Secara Online (Daring)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, S.H, M.H

Sekretaris
Hen rizal Hadi, Lc., M.A

Penguji I
Bambang Hermanto M.Ag

Penguji II
Dr. Abu Samah, MH.

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : SRI DALILA ASTUTI
NIM : 11627204313
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : MEKANISME PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Pembimbing: Ilham Akbar, SH.I., SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020,

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL

NIP. 1988 0430 2019031010

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/437

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/33630 tanggal 3 Juli 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SRI DALILA ASTUTI |
| 2. NIM | : | 11627204313 |
| 3. Universitas | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | MEKANISME PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : | BKD DAN PN BANGKINANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 8 Juli 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Badan Kepagawain Daerah Kabupaten Kampar di Bangkinang.
2. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kampar di Bangkinang.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Berkepentingan



RIWAYAT PENULIS

SRI DALILA ASTUTI, Dilahirkan di Kampar pada tanggal 26 April 1998 .Anak pertama dari lima bersaudara ini merupakan putri dari pasangan Kamaruzzaman,SH dan Arasniati, saat ini penulis tinggal di Desa Airtiris Kec. Kampar Kab. Kampar. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 015 desa Gobah sampai kelas 4 semester 2

kelas 4 pindah ke batam di SD 004 Sekupang tamat 2009, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 20 Tiban Baru, Kec. Sekupang Kepulauan Riau tamat pada tahun 2012 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kampar Kab. Kampar yang tamat pada tahun 2015.

Pada tahun 2016 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2018 penulis melakukan magang di Pengadilan Agama Bangkinang setelah itu melanjutkan kuliah kerja nyata (kkn) di desa Sungai Salang Hulu Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. Pada tanggal 11 agustus 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Pemberhentian Secara Tidak Hormat Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar” dengan predikat sangat memuaskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.